

STRATEGI MENGURANGI PRAKTEK RENTENIR DI KABUPATEN SUMEDANG

Rika Kusdinar*, Eri Herlianti, Neng Dewi, Nur Upit Fitriyani,
Rima Ramdiani, Srirahayu

Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April
E-mail: rikakusdinar0217@gmail.com

ABSTRACT

Cooperative Strategy In Reducing Flender Practices In Sumedang District is the result of qualitative research that aims to answer questions about how the most important goals or objectives need to be achieved, what are the most important policies? important and directing or limiting activities, How the main action stages or programs will achieve the goals set within the boundaries outlined. The research method used in this research is descriptive analysis research with a case study approach to the object. The informants in this study were 4 people, namely the Head of the Cooperative Division, the Head of the Institutional and Human Resources Development Section, the Head of the Business Development section, and finally the Head of the Facilitation and Capital section. Data collection was done by using interview, observation and documentation techniques. The conclusion of this study is that the cooperative sector strategy in reducing the practice of loan sharks by optimizing the role of cooperatives by socializing the role and importance of cooperating in the community, presenting sharia cooperative programs, improving the performance and management of professional and accountable cooperatives by providing training and cultural-based entrepreneurial direction. local so that they can develop community business activities in order to reduce the practice of moneylenders. Suggestions that researchers can give are to improve the sharia cooperative program in each village to make it easier to carry out savings and loans in cooperatives, to socialize the role of cooperatives, to make policies specifically to reduce the practice of moneylenders and to increase cooperative business support.

Keywords: Strategic Management, Cooperative, Flender Practices

PENDAHULUAN

Melihat kondisi perekonomian yang tidak menentu sekarang ini, maka semua orang berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu dihadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang merupakan unsur pelaksanaan

pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam bidang koperasi, usaha kecil menengah, yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil menengah, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi yaitu bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya. Berbagai

cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang telah dihadapi salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang kemudian di perbaharui dengan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, maka tersirat suatu harapan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan. Koperasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Salah satu kendala yang di hadapi koperasi yaitu adanya praktek rentenir. Praktek rentenir disebut sebagai lintah darat karena kegiatannya yang menghisap habis uang masyarakat demi mendapatkan provit dengan pemberlakuan bunga pada kredit yang di jalannya. Kemudahan memperoleh uang dalam waktu singkat dan hampir tidak ada

persyaratan membuat rentenir diminati dan dibutuhkan masyarakat kelas bawah. Masyarakat merasa tertolong oleh rentenir karena kebutuhan uangnya bisa terpenuhi dalam waktu singkat meskipun sadar harus membayar pengembalian jauh diatas pinjaman di sisi lain, kegiatan peminjaman antara rentenir dengan peminjam sulit untuk di nyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum karena bersifat sukarela antara peminjam dengan rentenir, seperti seseorang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi kepada tetangganya dan terjadi persetujuan diantara keduanya.

Kondisi tersebut membuat koperasi tidak menarik bagi sebagian masyarakat karena harus memenuhi persyaratan dan perturan perkoperasian yang tidak sederhana ketika berhubungan dengan rentenir. Dalam menghadapi hal tersebut maka koperasi berupaya untuk menambah minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi dan mengurangi persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Sehingga, koperasi dapat memajukan tingkat kewirausahaan koperasi dengan penambahan modal dalam pengembangan koperasi tersebut.

Oleh karena itu, perlu memformulasikan strategi baru agar praktek rentenir di Kabupaten Sumedang tidak menghambat usaha koperasi maka strategi yang perlu dilakukan dalam mengurangi praktek rentenir yaitu dengan mendirikan koperasi syari'ah.

Berdasarkan hasil observasi penulis mengamati terdapat beberapa fenomena-fenomena masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi bidang koperasi kepada masyarakat, Hal ini dibuktikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang tentang pemahaman manfaat koperasi.
2. Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kalangan masyarakat yang lebih memilih meminjam pada rentenir.
3. Kurangnya sistem pendukung usaha koperasi, Hal ini dibuktikan dengan kurangnya kerjasama dengan pihak luar sehingga koperasi kurang berkembang dengan baik.
4. Rendahnya program koperasi syari'ah, Hal ini dibuktikan dengan

kurang optimalnya program koperasi syari'ah yang sedang dijalani.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah yang akan diuraikan berupa:

1. Bagaimana tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan?
3. Bagaimana tahap-tahap tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan?

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Keputusan untuk memperluas volume aktivitas, untuk mendirikan pabrik dan kantor di tempat yang jauh, untuk berpindah ke fungsi ekonomis yang baru, atau untuk menjadi terdiversifikasi dalam berbagai jenis usaha ada kaitannya dengan pendefinisian dari tujuan dasar yang baru. Serangkaian tindakan yang baru harus dicanangkan dan sumber-sumber dialokasikan dan direalokasikan untuk dapat mencapai tujuan tersebut dan untuk mempertahankan dan memperluas aktivitas perusahaan di bidang yang baru sebagai tanggapan terhadap permintaan yang berubah, perubahan dalam sumber-sumber masukan, fluktuasi kondisi ekonomi,

perkembangan teknologi baru, dan tindakan para pesaing.

Strategi menjamin organisasi akan bertahan dan berkembang pada masa yang akan datang. Merumuskan strategi bukanlah pekerjaan yang mudah. Kendala utamanya adalah komitmen internal terhadap segala hal yang telah dirumuskan sebagai konsekuensi strategi. Makna penting dari pemahaman strategi sebagai pengambil tindakan yang berbeda dengan organisasi lain. Tanpa adanya strategi mustahil akan ada suatu pencapaian. Pencapaian yang diperoleh oleh suatu organisasi tentu tidak akan lepas dari penerapan strategi, tanpa adanya strategi, suatu organisasi tidak akan mencapai tujuan. Dan ketika terjadi sebuah kesalahan maka strategilah yang pertama dipertanyakan tepat atau tidaknya. Satu hal yang harus digaris bawahi bahwa strategi didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistic. Artinya, setelah strategi disusun,

semua unsur yang ada dalam organisasi menginternalisasikan visi dan misi secara baik dan benar karena dalam perspektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi (Rahmat, 2014).

Jenis-jenis strategi menurut Milles dan Snow dalam Winardi (2003) terdiri dari:

1. Defender. Mencari stabilitas dengan memproduksi hanya sejumlah produk terbatas yang ditujukan pada suatu segmen sempit dari seluruh pasar yang potensial.
2. Prospectors. Adalah hamper kebalikannya dari defender. Kekuatan mereka adalah menemukan dan mengeksploitasi produk baru dan peluang pasar.
3. Analyzers. Mencoba mengambil yang terbaik dari kedua strategi tersebut diatas. Mereka mencoba meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang untuk memperoleh laba.

METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Adapun sasaran penelitian terdiri dari para pegawai bidang koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Sedangkan informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Koperasi, Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pengembangan Sumber Daya

4. Reactors. Memawakili strategi sisa. Nama tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan pola-pola yang tidak konsisten dan tidak stabil yang timbul jika salah satu dari ketiga strategi lainnya dikejar secara tidak benar.

Strategi administrasi publik harus didasarkan pada masalah, kondisi, dan situasi real masyarakat Indonesia. Winardi (2003) menyatakan bahwa ada enam dimensi strategis yang dibicarakan dalam administrasi publik, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai.
2. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan.
3. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan dicapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan.

Manusia, Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi, dan Kepala Seksi Fasilitas dan Permodalan.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dilakukan melalui: Studi kepustakaan dan Studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh sebagai berikut : *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data), dan *Conclusion drawing verification* (pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan-tujuan dan Sasaran-sasaran yang Paling Penting dan yang Perlu Dicapai

Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang menyatakan apa saja yang perlu di capai, kapan hasil-hasil harus di laksanakan. Dari sasaran-sasaran nilai, menyatakan kearah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan organisasinya.

Berdasarkan hasil peneltian diketahui hal-hal yang berkaitan dengan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai oleh Bidang Koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

- a) Cara mengoptimalkan peran koperasi dalam mengurangi praktek rentenir yaitu dengan mensosialisasikan peran dan pentingnya berkoperasi di masyarakat. Bisa juga dengan koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat terdekat. Juga dengan diadakannya program koperasi syariah.
- b) Dengan diberikan pelatihan dan arahan kewirausahaan berbasis budaya lokal dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat agar mengurangi praktek rentenir.
- c) Cara meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoprasian dan dunia usaha yaitu dengan melalui pelatihan perkoperasian dunia usaha dan kewirausahaan. Dengan cara mendidik anggota-anggota koperasi agar memahami tentang produk

yang dimiliki. Yang dilakukan setiap mingguan di Desa.

- d) Dengan cara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Membina sesuai AD-ART serta SDM yang baik dapat meningkatkan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.
- e) Meningkatkan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel yaitu dengan Adanya pengurus yang amanah sesuai dengan skala pendidikan, dan pemilihan pengurus yang berkompeten. Kinerjanya sudah diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan sesuai dengan rapat anggota tahunan serta tidak menyimpang dari aturan yang sudah berlaku.

Kebijakan-kebijakan yang Paling Penting dan Mengarahkan atau Membatasi Kegiatan-kegiatan

Kebijakan-kebijakan (*policies*) merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik. Adapun hasil penelitian untuk dimensi kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan sebagai berikut:

- a) Terdapat tiga aspek cara menguatkan kelembagaan koperasi yaitu: kepengurusan, anggota, dan modal. Kepengurusan harus berkompeten karena dengan begitu maka peningkatan sumber daya manusia kuat.

- b) Cara menguatkan sistem pendukung usaha koperasi yaitu dengan bekerja sama dengan pihak luar, shareing dengan koperasi yang lain dan ikut pelatihan perkoperasian.
- c) Tidak adanya keluaran kebijakan sepihak karena sudah ada aturan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan juklas-juknisnya. Dan sebelum mengeluarkan kebijakan di musyawarahkan terlebih dahulu.
- d) cara menggiring masyarakat untuk lebih giat berwirausaha itu sangat sulit karena hal seperti itu timbul dari dirinya masing-masing. Namun koperasi sudah memberikan pelatihan, di fasilitasi permodalan dan sarana usaha agar masyarakat lebih giat dalam berwirausaha.
- e) Sulit mengajak masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai wadah pengelolaan dalam membangun wirausaha, karena anggota tidak dapat dipaksa untuk menjadikan koperasi sebagai wadah pengelolaan dalam berwirausaha. Namun para pengurus dan anak muda yang paham koperasi dapat melakukan penyuluhan untuk meyakinkan masyarakat keuntungan dan kelebihan koperasi.

Tahapan-tahapan Tindakan Pokok atau Program-program yang Akan Mencapai Tujuan-tujuan yang Ditetapkan Dalam Batas-batas yang Telah Digariskan

Tahapan tindakan pokok yaitu program-program yang

menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai saran-saran utama, mereka meyakini bagaimana saran-saran yang akan tercapai didalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur. Adapun hasil penelitian terkait dimensi ini adalah sebagai berikut:

- a) Cara mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktek rentenir sulit dilakukan, karena kebutuhan masyarakat yang berbeda. Tetapi bisa dikurangi jika masyarakat diberikan pengetahuan tentang perkoperasian dari keuntungan meminjam dikoperasi.
- b) Koperasi sudah bekerja sama dengan perangkat Desa. Dengan cara perangkat Desa memberikan arahan atau penyuluhan kepada masyarakat agar tidak meminjam kepada rentenir.
- c) Tidak ada rekrutment anggota karena menjadi anggota koperasi harus sesuai minat dan kepentingan yang sama tetapi harus mampu membayar simpanan pokok terlebih dahulu.
- d) Membangun stigma masyarakat untuk menjauhi riba dan melakukan proses simpan pinjam sulit dilakukan, karena masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda hal itu tergantung dirinya masing-masing tetapi Pemerintah daerah sudah membuat program koperasi syariah maksudnya untuk membantu masyarakat agar tidak meminjam kepada rentenir sehingga menjauhi riba.

PENUTUP

Kesimpulan

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang khususnya Bidang Koperasi telah memiliki strategi dalam mengurangi praktek rentenir di Kabupaten Sumedang yaitu melalui diadakannya koperasi syariah di setiap kecamatan, meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi koperasi.

Namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya motivasi dari dalam diri masing-masing masyarakat untuk melakukan usaha sendiri dan keinginan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana secara cepat dan besar tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Pemerintah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang telah membentuk koperasi syariah mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim sehingga segala bentuk pengelolaan koperasi syariah berbasis agama islam. Respon masyarakat khususnya di Perdesaaan tidak begitu antusias terkait koperasi baik itu koperasi konvensional

maupun syariah. Kebanyakan dari mereka enggan untuk menyimpan tetapi lebih cenderung ingin langsung meminjam tanpa terlebih dahulu menyimpan.

Saran

1. Bidang koperasi harus meningkatkan program koperasi syariah di setiap desa agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan simpan pinjam di koperasi.
2. Bidang koperasi harus mensosialisasikan peran koperasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan peran koperasi.
3. Bidang koperasi harus membuat kebijakan yang di khususkan untuk mengurangi praktek rentenir.
4. Bidang koperasi harus meningkatkan lagi sistem pendukung usaha koperasi yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak luar agar hasil produk dari koperasi tersebut dapat berkembang dengan baik.
5. Bidang koperasi harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang keuntungan dan kelebihan koperasi di kalangan masyarakat agar masyarakat menjadikan koperasi sebagai wadah pengelolaan dalam membangun wirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Moh & Sutrisni, Sutrisni. (2013). Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah Di Kabupaten Sumenep. *PERFORMANCE Jurnal Bisnis & Akuntansi*. 3. 10.24929/feb.v3i2.103.
- Akadun. 2005. *Pemberdayaan Birokrasi Pemerintah*. Bandung: CV Maulana.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Bungin, H.M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dessler, Gary. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Indeks, Kelompok Gramedia.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen (Edisi 2)*. Yogyakarta: BPFE
- Heizer, Jay dan Barry Render. 2006. *Manajemen Operasi (Edisi Tujuh)*. Jakarta: Salemba Empat
- Iskandar, Jusman. 2014. *Kapita Selekta Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga
- Kadmasasmita, Ahmad Djuaeni. 2005. *Manajemen Strategis (Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta: LAN Republik Indonesia.
- LAN Republik Indonesia. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. *Perilaku dan Budaya Organisasi*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2005 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN RI.
- Nitisemito, Alex. 1989. *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, Abdul H. P., and Hardi Warsono. "Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Koperasi Tidak Aktif Di Jawa Tengah." *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 5, no. 2, 2016, pp. 527-542.
- Safiie, Inu Kecana; Djamaludin Tanjung, Supardan Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sandra Septian. 2016. Penelitian tentang: *Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Lampung.
- Sarwoto. 1991. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saydam, Gouzali. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Jilid 2)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi tentang Ilmu Adminstrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Stoner, James AF, Edward Freeman & Daniel R Gilbert JR. 1999. *Manajemen (Alih bahasa oleh Alexander Sindoro)*. Jakarta: Prehallindo.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- S. Sumarsono et.al. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- STIA. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-dimensi Prima Administrasi Negara*. Yogyakarta: UGM.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*
- Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 2003. *Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yakub, Hamzah. 1984. *Manajemen dan Kepemimpinan*. Jakarta: Gunung Agung
- Zauhar, Soesilo. 1996. *Reformasi Administrasi, Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.